

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**KECAMATAN LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Lampihong menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Lampihong dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan Capaian Kinerja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Lampihong pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 ini disusun untuk menyajikan Laporan Capaian Indikator Kinerja dan Evaluasi atas Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lampihong selama Tahun 2024.

Adapun Tujuan Strategis Kecamatan Lampihong Tahun 2024 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik, dengan indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi pada Kecamatan Lampihong. Adapun Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Tahun 2024 adalah sebesar 87,73 atau dengan Rasio Capaian sebesar 99,69%.

Untuk Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial, realisasinya adalah sebesar 87,73 atau Rasio Capaian 99,69%.
- 2) Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, realisasinya adalah 167 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau Rasio Capaian 100%.
- 3) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.

- 4) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.
- 5) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.

Untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut Alokasi Anggaran Kecamatan Lampihong tahun 2024 sebesar Rp 7.899.870.702,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.600.657.093 dengan persentase sebesar 96,21 yang meliputi Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 4,062,281,052 dengan realisasi sebesar Rp 3,881,936,301 atau 95,56 % dan anggaran operasional kegiatan sebesar Rp 3.837.589.650,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.718.720.792 atau 96,90 %.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 ini, selanjutnya dapat dijadikan sebagai :

- a. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- b. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kecamatan Lampihong dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum SKPD	3
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Perencanaan Kinerja	9
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)	9
2.1.2. Rencana Kerja (Renja)	10
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK)	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Akuntabilitas Kinerja	18
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.2. Realisasi Anggaran	25
3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya	29
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Upaya Perbaikan	32
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Kepegawaian Kecamatan Lampihong	7
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	10
Tabel 2.2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2024	11
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong Tahun 2024	14
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD Tahun 2024 ..	17
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja SKPD	18
Tabel 3.2. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	19
Tabel 3.3. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.....	20
Tabel 3.4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	21
Tabel 3.5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	23
Tabel 3.6. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	27
Tabel 3.7. Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)	29
Tabel 3.8. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023	31
Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong Tahun 2024	32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan	4
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Lampihong	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada beberapa regulasi yang mengatur kecamatan dalam menjalankan roda pemerintahannya, salah satunya yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan tersebut, maka Kecamatan Lampihong menyusun Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Balangan sebagaimana tercantum pada RPJMD 2021-2026. Dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD tersebut, kecamatan Lampihong menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD selanjutnya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD atau Camat.

Pertanggungjawaban atas Rencana Renja (Renja) inilah, Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023).
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 83).

1.3. Tujuan

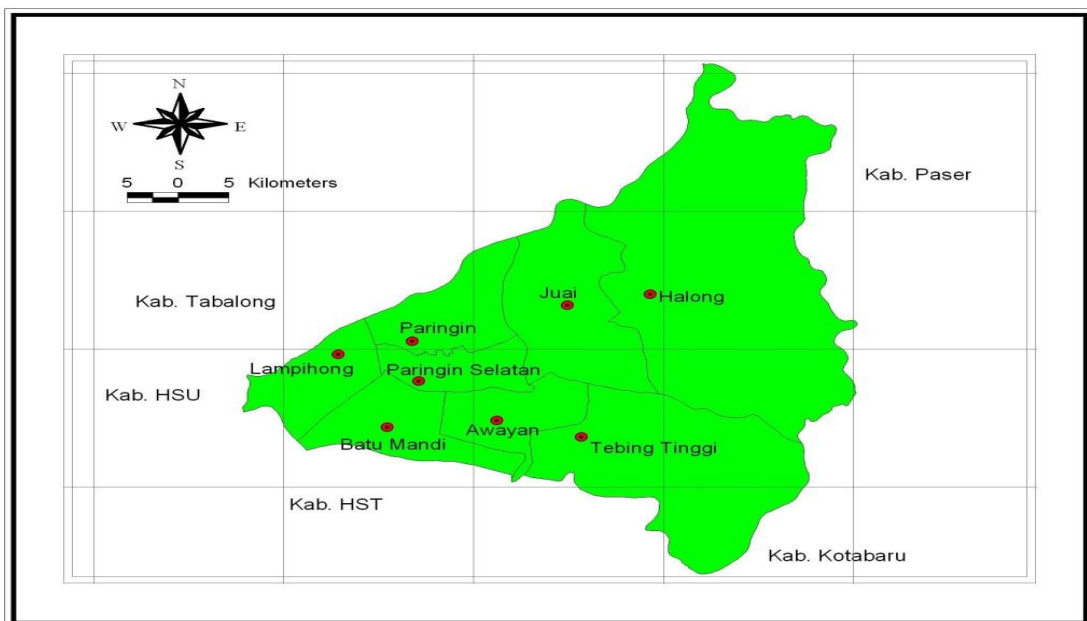
Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai :

1. Sarana Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Lampihong dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, termasuk dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

2. Bahan Penilaian dan Sarana Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja, baik Kinerja Tujuan Strategis SKPD maupun Sasaran Strategis SKPD.
3. Bahan pengambilan keputusan, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam rangka Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana Kerja dan Hasil Kerja.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Lampihong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Penduduk Kecamatan Lampihong merupakan suku Banjar yang semuanya beragama Islam dan bertutur dalam dialek Bahasa Banjar Hulu. Pada masa Sultan Adam, wilayah ini terdiri dari beberapa banua dalam Distrik Balangan yaitu Banua Tanah Habang, Banua Lampihong dan Banua Kusambi.



Gambar 1.1.
Peta Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

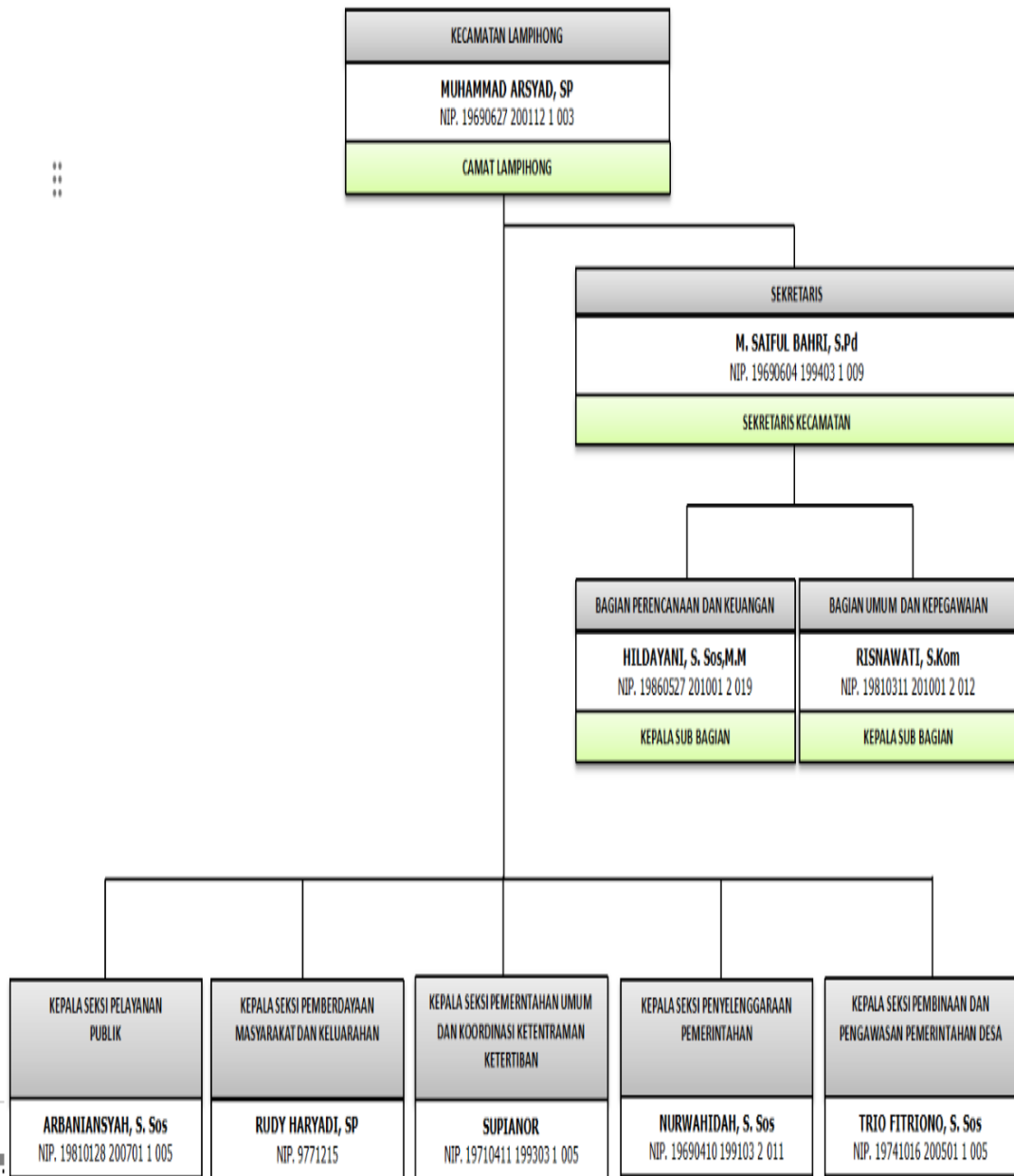
Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan yang dipimpin Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
6. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Di bawah ini adalah Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Lampihong Tahun 2024.

STURUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LAMPIHONG



Data Kepegawaian pada Kecamatan Lampihong Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Data Kepegawaian Kecamatan Lampihong

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Kasi Pemerintahan	1
4	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa	1
5	Kasi Peembangunan	1
6	Kasi Ketentraman dan ketertiban	1
7	Kasi pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial	1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
9	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1
10	Staf	24
11	Honoror	47
Jumlah Pegawai		71

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Menjelaskan hal yang melatarbelakangi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1.3 Tujuan

Menjelaskan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Tahun 2024.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Menjelaskan Profil Kecamatan Lampihong baik dari Letak Geografis, Tugas Organisasi sesuai Regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi, berikut Target Kinerja yang harus dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi, berikut Analisa Faktor Pendukung dan Penghambatnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menjelaskan tentang Kesimpulan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi.

4.2 Upaya Perbaikan

Menjelaskan tentang upaya yang akan dilaksanakan Organisasi untuk memperbaiki Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Lampihong mendukung pelaksanaan Misi IV yaitu Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Kualitas Layanan Birokrasi Pemerintahan pada Kecamatan Lampihong.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lampihong sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Seksi pada Kecamatan Lampihong.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditentukan Sasaran Strategis Kecamatan Lampihong, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.

4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Di bawah ini disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Lampihong berikut Indikator dan Targetnya.

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

2.1.2. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85	86	87	88	89	89
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kesejahteraan sosial	85	86	87	88	89	89
		Meningkatkan fasilitas pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif	-	-	147	167	247	247
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	-	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Tertib Administrasi pemerintahan	-	-	100	100	100	100
	Persentase Desa yang tertib administrasi keuangan				100	100	100	100	

**Tabel 2.2.Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong
Tahun 2024**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun berjalan 2024	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(5)	(6)
Kecamatan Lampihong	Kecamatan Lampihong		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP SKPD	74	
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	80,298,500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	13,718,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	66,580,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP),	74 Nilai	4,062,281,052
Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	520 OB	4,062,281,052

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	5,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	234,817,900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	85,755,600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	35,371,000
Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	658,194,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	535,640,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Bulan	535,640,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	879,493,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	93,532,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	785,961,500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	186,633,350
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	133,123,350
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	53,510,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	166,399,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Laporan	166,399,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	166,399,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	371,274,300
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	96,700,000

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	22 keluarga	96,700,000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	274,574,300
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	274,574,300
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	94,154,800
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Laporan	94,154,800
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	94,154,800
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dok	313,780,700
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	1 Laporan	313,780,700

Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	190.777.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	50.370.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	78.396.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	43.641.000
Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan batas desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan batas desa	1 Dok	18.370.000
Total			7.899.870.702,00

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong setelah dilakukannya Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading terbaru, adalah Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis SKPD. Berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong Tahun 2021-2026 yang dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Lampihong Tahun 2024
Tujuan SKPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah
Kecamatan yang Baik

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p>Makna Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Kecamatan Lampihong</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong terhadap pelayanan yang diberikan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seluruh Seksi
2	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa	<p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintah Desa

		(LKD) yang Aktif	<p>(LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Kecamatan Lampihong dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p>Makna Indikator : Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong dalam menjaga Kondusifitas Wilayah</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Trantib

			Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembi-naan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintahan Desa
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembi-naan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Keuangan yang</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintah Desa

			Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%		
			Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri		

2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, maka Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD pada Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala SKPD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial</i>	88
2	Meningkatnya fasilitas pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif</i>	167
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	<i>Persentase Gangguan dan ketertiban Umum yang ditangani</i>	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	<i>Persentase Desa yang Tertib Administrasi pemerintahan</i>	100%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan desa	<i>Persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan</i>	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Selain Pertanggungjawaban Keuangan, maka Pertanggungjawaban Kinerja adalah sesuatu yang wajib untuk disampaikan oleh setiap SKPD kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia melalui Bupati Balangan, dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian Rata-Rata atas Indikator Kinerja dibagi menjadi tujuh kategori, yaitu :

Tabel 3.1.
Kategori Capaian Kinerja SKPD

No	Kategori Capaian	Angka Interpretasi
1	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 - 90	Memuaskan
3	> 70 - 80	Sangat Baik
4	> 60 - 70	Baik
5	> 50 - 60	Cukup Baik
6	> 30 - 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

Berikut Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Lampihong Tahun 2024, yaitu :

3.1.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Strategis yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator kinerja	2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			target	realisasi	Capaian							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	109,27	88	87,73	99,69	89	99,69	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik

Indikator Kinerja dari Tujuan Strategis Kecamatan Lampihong adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lampihong, Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja ditetapkan setelah Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading pada Akhir Tahun 2023, sehingga Realisasi Kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Kinerja Tujuan Utama Tahun 2024 lebih rendah dari target yang ditetapkan . begitu pun juga dengan Capaian Kinerjanya yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh seksi pelayanan dan Kesejahteraan sosial ditahun 2023 ada kenaikan Nilai IKM Karena berdasarkan hasil pengukuran IKM yang telah dilakukan oleh kantor Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan Priode juli sampai dengan desember 2023 dengan jumlah responden 70 (tujuh puluh orang) yang membutuhkan pelayanan maka

diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95,07 Masuk dalam kategori pelayanan Sangat Baik,

Walau demikian unsur kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum diatas dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan masih mendapat nilai terendah dari semua unsur yaitu 3,57 yang perlu diperbaiki dan diperhatikan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh seksi pelayanan dan Kesejahteraan sosial ditahun 2024 ada penurunan Nilai IKM Karena berdasarkan hasil pengukuran IKM yang telah dilakukan oleh kantor Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan Priode juli sampai dengan desember 2024 dengan jumlah responden 85 (delapan puluh lima) orang yang membutuhkan pelayanan maka diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,73 Masuk dalam kategori pelayanan Baik,

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana, waktu pelayanan dan Sistem Mekanisme Prosedur.

Adapun kondisi permasalahan / kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belum adanya Tindakan atas penambahan pengusulan anggaran sarana dan prasarana laptop dan computer.
2. Belum terlaksananya pembuatan pelaksanaan pelayanan berdasarkan SOP yang ditentukan.
3. Belum terlaksananya system mekanisme dan prosedur layanan berdasarkan SOP yang berlaku.

Rencana Aksi yang dilakukan dalam rangka peningkatan IKM Tahun 2024 adalah :

1. Penambahan sarana dan prasarana seperti laptop dan computer
2. Menyediakan layanan pengaduan sarana pelayanan melalui kotak saran ataupun Media Sosial.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap prosedur pelayanan.

4. Membuat buku tamu digital dengan barcode
5. Membuat SKM Online dengan aplikasi / barcode selain SKM Manual.

3.1.2 Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat

Indikator kinerja	2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	-	109,27	88	87,73	99,69	89	99,69	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Baik

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2024, adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Semester I dan II. Adapun Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 87,73 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88. Sedangkan untuk Capaian Kinerjanya sendiri adalah sebesar 99,69%.

Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana

dan prasarana, waktu pelayanan dan Sistem Mekanisme Prosedur.

Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah pertama yaitu 3,13, selanjutnya jangka waktu yang mendapatkan nilai 3,24 adalah nilai terendah kedua, begitu juga sistem mekanisme dan prosedur termasuk tiga unsur terendah yaitu 3,44.

- b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023.

Untuk Tahun 2022, Realisasi Kinerja belum bisa diukur karena sasaran belum termasuk dalam pohon kinerja dan cascading yang disusun sehingga tidak ada perbandingan.

Sedangkan untuk Tahun 2023, Realisasi Kinerja sebesar 95,07 dengan Target Kinerja sebesar 87, atau dengan Capaian Kinerja sebesar 109,28%.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial pada Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lampihong adalah sebesar 89. Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sebesar 87,73, maka Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 98,57%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Dikarenakan dengan tidak adanya data pembandingan antara Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lampihong Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan

Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lampihong Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun yang menjadi penyebab Realisasi Kinerja Turun adalah dikarenakan adanya penurunan terutama pada penilaian survey kepuasan Masyarakat pada sarana prasarana, waktu pelayanan dan sistem mekanisme prosedur.

Adapun kondisi permasalahan / kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Belum adanya Tindakan atas penambahan pengusulan anggaran sarana dan prasarana laptop dan computer.
- Ruang yang sempit dan kurang representatif.
- Belum terlaksananya system mekanisme dan prosedur layanan berdasarkan SOP yang berlaku.\

Adapun Alternatif Solusi yang bisa dilakukan adalah :

- Penambahan sarana dan prasarana seperti laptop dan computer
- Menyediakan layanan pengaduan sarana pelayanan melalui kotak saran ataupun Media Sosial.
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap prosedur pelayanan.
- Membuat buku tamu digital dengan barcode

- Membuat SKM Online dengan aplikasi / barcode selain SKM Manual.



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1.2.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	IKM Pelayanan dan Kesejahteraan Sosian	88	87,73	99,69	166.399.000	165.770.400	99,62	0,38

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah lumayan, karena dengan melakukan Efisiensi Anggaran sebesar 0,38%, Capaian Kinerja 99,69 ini turun dari tahun sebelumnya karena adanya penurunan dari unsur sarana prasarana yang dianggap masih kurang

representatif, Pagu Anggaran digunakan untuk merealisasikan Kegiatan Penunjang yang Wajib dilaksanakan seperti Pelaksanaan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan serta pengiriman Kafilah MTQ ke Kabupaten serta kegiatan yang menyangkut pelayanan terhadap Masyarakat.

- g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

**Tabel 3.1.3.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang**

7.01.02			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Adapun Serapan Anggaran dalam rangka mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis 1 di atas adalah sebesar 99,63%. Yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar RP.165,770.440 dengan Pagu Anggaran Rp. 166.399.000,-

3.1.1.1. Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1.4.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian							
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	147	167	167	100	267	62,54%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100	Berhasil

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 Realisasi Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Tahun 2024 adalah sebanyak 167 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dari target yang telah ditetapkan sebanyak 167 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Atau dengan Capaian Kinerja adalah sebesar 100% sesuai target.
- b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Ditetapkannya Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, dengan Target Kinerja sebanyak 147 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Realisasi Kinerja yang

bisa dicapai adalah sebanyak 147 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. Maka, baik Realisasi maupun Capaian Kinerja Tahun 2024 jauh lebih baik dari Tahun N-1. Kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah LKD sebanyak 20 LKD yang baru terbentuk seperti adanya penambahan Posyandu Lansia dan Posyandu Remaja dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Lampihong, karena memang di awal tahun 2024 memang sudah ada beberapa desa yang ditargetkan untuk membentuk LKD dan penambahan yang diharapkan adalah sebanyak 20 LKD aktif ini terkait kesadaran dan motivasi dari desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dari segala usia.

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)
KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

NO	DESA	JUMLAH			
		RT	PKK	POSYANDU	KARANG TARUNA
1	Jungkal	4	1	1	1
2	Kusambi Hulu	4	1	1	1
3	Kusambi Hilir	5	1	1	1
4	Kupang	2	1	1	1
5	Sungai Awang	2	1	1	0
6	Lok Hamawang	3	1	1	0
7	Pupuyuan	4	1	1	1
8	Lajar	4	1	1	1
9	Matang Hanau	5	1	1	1
10	Mundar	4	1	1	1
11	Hilir Pasar	3	1	1	1
12	Lampihong Kiri	2	1	1	0
13	Simpang Tiga	4	1	1	1
14	Lampihong Kanan	4	1	1	1
15	Batu Merah	5	1	1	1
16	Sungai Tabuk	2	1	1	0
17	Lok Panginangan	3	1	1	0
18	Panaitan	6	1	1	1
19	Lampihong Selatan	3	1	1	1
20	Tampang	3	1	1	0

21	Kandang Jaya	4	1	1	1
22	Jimamun	4	1	1	0
23	Tanah Habang Kanan	2	1	1	1
24	Tanah Habang Kiri	3	1	1	0
25	Matang Lurus	4	1	1	1
26	Pimping	3	1	1	1
27	Teluk Karya	2	1	1	1
JUMLAH		94	27	27	19
TOTAL KESELURUHAN		167			

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1, Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 65%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Dikarenakan dengan tidak adanya data pembandingan antara Realisasi Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Kecamatan Lampihong Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Kecamatan Lampihong Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan pemberdayaan LKD salah satunya adalah Tingkat kesadaran desa terhadap

keberadaan LKD dalam rangka Pembangunan desa untuk maju.

Sedangkan Salah satu faktor yang menjadi penyebab Rasio Capaian Kinerja 100% adalah Keaktifan pihak kecamatan dalam melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi pelatihan tentang pentingnya Peningkatan kapasitas LKD Karena LKD merupakan lembaga yang membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. LKD juga ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. LKD bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini adalah foto- foto kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan di Kecamatan:





Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi serta memberikan motivasi kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dimaksud, tentang pentingnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam jalannya Roda Pemerintahan Desa, Pendataan LKD, Peningkatan kapasitas pengurus LKD, Rakor KPM Posyandu, Monitoring dan Evaluasi ke desa desa, pembinaan PKK, Rapat RT dan Rapat Karang Taruna. Berikut ini adalah foto foto kegiatan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan LKD di Kecamatan Lampihong :



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.5.
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	167	167	100	371,274,300	343.295,019	92	8%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah lumayan, walaupun hanya sebesar 8%, dengan Capaian Kinerja sebesar 92%. Walaupun kurang maksimal, tetapi Capaian Kinerja sebesar 92% sudah masuk Kategori Berhasil.

g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah

Tabel 3.1.6.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

7.01.03			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
7.01.03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa
7.01.03	2.01	0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan
7.01.03	2.06		Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga ditingkat Kecamatan dan Kelurahan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Adapun Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis 2 di atas adalah sebesar 100%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 96.700.000,00,- dengan Pagu Anggaran Rp. 96.700.000,00,-.

3.1.2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1.7.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah
Kecamatan

Indikator kinerja	2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			target	realisasi	Capaian							
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%	Berhasil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan Target Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Ditetapkannya Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, Target Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani adalah sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Sehingga Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1, Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 100%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Dikarenakan dengan tidak adanya data pembandingan antara Realisasi Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Lampihong Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Lampihong Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan. Adapun faktor pendorong keberhasilan dari Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Kecamatan Lampihong Tahun 2024 adalah :

1. Bidang Trantib Kecamatan Lampihong selalu berkoordinasi dengan baik Kepolisian, TNI, Satpol PP Kabupaten Balangan dan linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di kecamatan lampihong,

2. Dalam bidang penanganan bencana Faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu terjadinya kolaborasi yang harmonis antara instansi BPBD kabupaten Balangan sehingga dalam penanganan bencana di kecamatan lampihong dapat di tangani Damkar dan TRC Kecamatan Lampihong dengan cepat dan baik.
3. Sumber Daya Anggaran (Money) yang mencukupi pada Kecamatan Lampihong. Serta sudah selarasnya antara Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis 3 ini, selanjut anggaran yang ada di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebencanaan dan lainnya, pelatihan peningkatan kapasitas linmas berikut ini adalah foto – foto kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan di Kecamatan:



Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah

1. Melaksanakan Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban Diwilayah Kecamatan Lampihong.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur bidang trantib melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bidang ketentraman dan ketertiban dan kebencanaan.
3. Melakukan inovasi DESTANA (Desa Tangguh Bencana) sebagai wadah dalam Upaya percepatan pelaporan dan penanganan bencana agar lebih cepat dan efektif.
4. Memberikan apresiasi dalam penghargaan linmas dalam mewakili kecamatan lampihong.
5. Mengadakan Perlombaan antar Desa lingkup kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, meningkatkan solidaritas antar linmas dan motivasi desa.

f. Analisis atas Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.8.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100	100	100	94,154,800	89.404.000	95	5%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja cukup rendah, karena hanya sebesar 5%.

Tetapi dengan Capaian Kinerja sebesar 100%, maka Efisiensi Penggunaan Anggaran menjadi tidak begitu berpengaruh.

g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah

Tabel 3.1.9.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

7.01.04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum
7.01.04	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum
7.01.04	2.01	0001	Sinergisitas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Adapun Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis 3 di atas adalah sebesar 95%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 94,158.800,- dengan Pagu Anggaran Rp. 89.404.000,-.

3.1.3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Untuk Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1.10.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja	2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			target	realisasi	Capaian							
Persentase Desa yang tertib Administrasi Pemerintahan	-	100	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%	Berhasil	

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 Realisasi Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan Target Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.
- b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Ditetapkannya Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, Target Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan adalah sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Sehingga Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1, Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 100%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Seperti halnya Sasaran Strategis 2, yaitu dikarenakan dengan tidak adanya data pembanding antara Realisasi Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Tahun 2024, baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam melaksanakan realisasi kinerja persentase desa tertib administrasi pemerintahan Kecamatan Lampihong tahun 2024 mengalami berbagai Kendala yaitu :

1. Aparat desa kurang memperhatikan dalam pengisian administrasi desa seperti buku – buku administrasi desa yang tidak terisi dengan lengkap.
2. Buku administrasi BPD Juga Tidak lengkap yang berdampak pada laporan kinerja BPD.

3. Kebanyakan desa tidak mengupload data Prodeskel dan Epideskel dengan lengkap sehingga sehingga tidak bisa mengikuti lomba desa Tingkat kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Untuk menghadapi masalah tersebut maka ada beberapa Solusi dan rencana aksi yang dilakukan yaitu :

- Bagian seksi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan mengadakan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi terkait pengisian buku buku – buku administrasi desa.
- Bagian seksi penyelenggaraan pemerintahan mengadakan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi pengisian buku Administrasi BPD dengan inovasi E-Lapor BPD Supaya pembuatan kinerja BPD Lebih Cepat.
- Memberikan himbauan kepada desa agar dapat mengikutkan kasi pemerintahan atau admin Prodeskel dan Epideskel untuk mengikuti Bimtek dan FGD supaya lebih mudah untuk mengupdate data prodeskel dan Epideskel di desa masing – masing agar dapat mengikuti lomba desa Tingkat Kabupaten.

.berikut foto – foto kegiatan monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa yang dilaksanakan:



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.11.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

KINERJA UTAMA	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	100	100	100	50.370.000	50.334.000	99,93%	0,7%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah cukup lumayan, yaitu sebesar 0,7%. Apalagi dengan Capaian Kinerja sebesar 100%, maka Efisiensi Penggunaan Anggaran menjadi berbanding lurus dengan Capaian Kinerjanya.

g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah

Tabel 3.1.12.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

7.01.06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
7.01.06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Adapun Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran Strategis 4 di atas adalah sebesar 99,93%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 50.370.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 50.334.000,.

Tabel 3.1.13.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja	2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			target	realisasi	Capaian							
Persentase desa yang tertib administrasi Keuangan	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%	Berhasil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 Realisasi Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan Target Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dengan ditetapkannya Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan, adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023. Sehingga hal ini yang menyebabkan Realisasi dan Capaian Kerjanya hanya bisa dibandingkan dengan Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, Target Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan adalah sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100%. Atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Sehingga Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dikarenakan Target Kinerja Tahun 2026 atau Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Target Kinerja Tahun N-1, Tahun N dan Tahun N+1, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Akhir Periode Rencana Strategis (Renstra) sama dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 itu sendiri, yaitu 100%.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota atau Standar Nasional

Sama halnya dengan Indikator Kinerja Pertama untuk Sasaran Strategis 4, yaitu dikarenakan dengan tidak adanya data pembanding baik itu dengan Kabupaten/Kota atau dengan Standar Nasional, maka Capaian Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Tahun 2024 terhadap keduanya tidak bisa diperoleh.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun faktor yang menjadi pendorong keberhasilan dari Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Tahun 2024. Selain dari tersedianya Sumber Daya Manusia (Man) yang mumpuni dan Sumber Daya Anggaran (Money) yang mencukupi pada Kecamatan Lampihong, juga bahwa Pemerintah Desa sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)). Sehingga Laporan Keuangan Desa baik Semester maupun Tahunan tersedia di sana, serta adanya

monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke desa dalam rangka pengawasan dan pembinaan administrasi keuangan desa baik dalam penyusunan RKPDES Maupun APBDES.

Rencana Aksi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja administrasi keuangan desa kedepan adalah dengan membuat inovasi dari bidang Pembangunan yaitu ACCER (APBD Cepat,tepat dan Cermat)

berikut ini foto kegiatan monitoring dan evaluasi keuangan desa.



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk melihat sejauh mana Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.14.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	100	100	100	78.396.000	78.396.000	100%	0%

Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk mencapai Target Indikator Kinerja sudah 100%. Akan tetapi kalau melihat Capaian Kinerjanya yang sebesar 100%, maka Efisiensi Penggunaan Anggaran menjadi begitu bermakna, anggaran yang tersedia digunakan untuk berbagai kegiatan yang menunjang dalam fasilitasi keuangan dan asset desa.

g. Analisis atas Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

Tabel 3.1.15.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

7.01.06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
7.01.06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja sudah sesuai dengan Cascading yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja.

Adapun Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Sasaran

Strategis 4 di atas adalah sebesar 100%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 78.396.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 78.396.000,-.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN LAMPIHONG

Indikator kinerja	2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	-	109,27	88	87,73	99,69	89	99,69	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sangat memuaskan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aKtif	-	100	167	167	100	267	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sangat memuaskan
Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ad	100%	Sangat memuaskan
Persentase desa yang tertib administrasi Pemerintahan	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ad	100%	Sangat memuaskan
Persentase desa yang tertib administrasi keuangan	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ad	100%	Sangat memuaskan

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Kecamatan Lamphong tahun 2024 sebesar Rp 7.899.870.702,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.600.657.093 dengan persentase sebesar 96,21 yang meliputi Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 4,062,281,052 dengan realisasi sebesar Rp 3,881,936,301 atau 95,56 % dan anggaran operasional kegiatan

sebesar Rp 3.837.589.650,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.718.720.792 atau 96,90 %.

Berikut adalah data perbandingan antara Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.16.
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG KINERJA	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN REALISASI	KETERANGAN (KOLOM INI MENJELASKAN REALISASI KEUANGAN DI BAWAH 100%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.250.974.165,00	6.763.484.902,00	6.447.143.294,00	95%	Karena terdapatnya sub kegiatan yang tidak telaksana 100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.004.000,00	80.298.500,00	80.077.900,00	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.754.000,00	13.718.500,00	13.718.500,00	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.250.000,00	66.580.000,00	66.359.400,00	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.783.044.415,00	4.062.281.052,00	3.881.936.301,00	96%	Adanya ASN Kecamatan Lampihong yang pensiun
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.783.044.415,00	4.062.281.052,00	3.881.936.301,00	96%	Adanya ASN Kecamatan Lampihong yang pensiun
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.845.900,00	1.014.138.500,00	1.011.184.460,00	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.752.400,00	234.817.900,00	233.317.300,00	99%	Telah terlaksana seluruh kegiatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.473.500,00	85.755.600,00	85.755.600,00	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.704.000,00	35.371.000,00	34.331.000,00	97%	Telah terlaksana seluruh kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.916.000,00	658.194.000,00	657.780.560,00	100%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		535.640.000,00	502.760.000,00	94%	Penyesuaian harga di e-katalog, Sudah terbayar penuhnya dan Telah terbayar
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		535.640.000,00	502.760.000,00	94%	Penyesuaian harga di e-katalog
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	821.344.000,00	879.493.500,00	847.393.766,00	96%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.282.500,00	93.532.000,00	68.718.988,00	73%	Sudah terbayar penuhnya
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.061.500,00	785.961.500,00	778.674.778,00	99%	Telah terbayar
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	113.735.850,00	186.633.350,00	177.771.347,00	95%	Telah terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Kecamatan Lampihong
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	93.435.850,00	133.123.350,00	124.261.347,00	93%	Telah terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Kecamatan Lampihong
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.300.000,00	53.510.000,00	53.510.000,00	100%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	111.374.400,00	166.399.000,00	165.770.400,00	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	111.374.400,00	166.399.000,00	165.770.400,00	100%	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111.374.400,00	166.399.000,00	165.770.400,00	100%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	245.986.800,00	371.274.300,00	343.295.019,00	92%	Karena terdapatnya sub kegiatan yang tidak telaksana 100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.000.000,00	96.700.000,00	96.700.000,00	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.000.000,00	96.700.000,00	96.700.000,00	100%	

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	197.986.800,00	274.574.300,00	246.595.019,00	90%	Karena terdapat rencana kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun ini
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	197.986.800,00	274.574.300,00	246.595.019,00	90%	Karena terdapat rencana kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun ini
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.134.800,00	94.154.800,00	89.404.000,00	95%	Karena terdapatnya sub kegiatan yang tidak terlaksana 100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.134.800,00	94.154.800,00	89.404.000,00	95%	terdapat pembayaran honor tenaga pemadam kebakaran yang hanya terbayar dari bulan september s.d Desember
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.134.800,00	94.154.800,00	89.404.000,00	95%	terdapat pembayaran honor tenaga pemadam kebakaran yang hanya terbayar dari bulan september s.d Desember
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	192.236.500,00	313.780.700,00	305.358.900,00	97%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	192.236.500,00	313.780.700,00	305.358.900,00	97%	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	192.236.500,00	313.780.700,00	305.358.900,00	97%	Penyesuaian harga di e-katalog
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	140.137.000,00	190.777.000,00	190.705.000,00	100%	
	Fasilitasi Administratif, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	140.137.000,00	190.777.000,00	190.705.000,00	100%	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.870.000,00	50.370.000,00	50.334.000,00	100%	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	47.256.000,00	78.396.000,00	78.396.000,00	100%	
	fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	43.641.000,00	43.641.000,00	43.641.000,00	100%	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18.370.000,00	18.370.000,00	18.334.000,00	100%	
	Total	5.983.843.665,00	7,899,870,702	Rp 7.600.657.093	96,21	

3.3. Analisis Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2024, Ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Kecamatan Lampihong antara lain:

1. Juara III Menu Balita Lomba Masak serba Ikan (LMSI) Tingkat Kabupaten Balangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Peternakan dengan TPP PKK Kabupaten Balangan.
2. Juara Harapan 3 Peserta Lomba PBB Anggota Satlinmas Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2024



Adapun terkait dengan Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, maka Kecamatan Lampihong menindaklanjuti hal tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1.17.
Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023

No	Aspek Yang Dinilai	Temuan	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Perencanaan	1 . Belum terdapat bukti upload dokumen SAKIP pada website E-SAKIP.	1 . Membuat bukti upload dokumen SAKIP pada website E-SAKIP https://esr.menpan.go.id/index.php/home	untuk uopload dokumen SAKIP pada website http://esr.menpan.go.id/index.php/home sudah dilaksanakan Cuma kurang terpantau oleh pemeriksa inspektorat
		2 . Membuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai, yaitu pada pemilihan kata pada tujuan belum berorientasi hasil karena menggunakan kata "Meningkatkan".	2 . Membuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan kata yang berorientasi hasil seperti "Meningkatnya", "Terwujudnya", "Tercapainya" dan lain sebagainya.	Untuk tujuan sasaran di pohon kinerja terbaru sudah menggunakan kata yang berorientasi hasil seperti "meningkatnya, terwujudnya dll
		3 . Perjanjian Kinerja belum selaras dengan Perencanaan Kinerja (Renja) karena terjadi perubahan sasaran dan Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	3 . Membuat Perjanjian Kinerja yang selaras dengan Perencanaan Kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja).	untuk perjanjian kinerja yang akan adatang sudah selaras dengan RENSTRA
2	Pengukuran	1 . Belum terdapat bukti dukung rapat monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan di internal SKPD dimana hal tersebut menjadi salah satu bentuk bukti dari Pimpinan selalu terlibat	1 . Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi triwulanan kinerja di internal SKPD dan membuat bukti kelengkapannya.	Sudah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi triwulanan kinerja internal SKPD Dan kelengkapannya

		sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.		
		2 . Belum terdapat jadwal Pengukuran Kinerja secara berkala.	2 . Membuat Jadwal Pengukuran Kinerja.	Sudah membuat jadwal pengukuran kinerja 2024
		3 . Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja secara garis besar.	3 . Menambahkan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).	untuk Lkip terbaru 2024 sudah menggunakan tabel efisiensi anggaran
		4 . Belum terdapat laporan pengukuran kinerja triwulanan di internal SKPD.	4 . Membuat Laporan Pengukuran Kinerja di Internal SKPD.	Laporan pengukuran kinerja internal SKPD sudah dibuat dari pejabat struktural sampai pelaksana

3	Pelaporan	1	Dokumen Laporan Kinerja . sudah memberikan informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya (n-1) namun untuk tahun sebelumnya lagi (n-2) tidak dapat dijabarkan karena terjadi perubahan sasaran.	1	Membuat informasi mengenai . perbandingan target dan realisasi atas capaian kinerja tahun evaluasi dan tahun-tahun sebelumnya (n-1), (n-2) dan seterusnya selama 1 periode RPJMD/Renstra pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).	sudah membuat target perbandingan target dan realisasi atas capaian kinerja sebelumnya
		2	Dokumen Laporan Kinerja . belum menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.	2	Agar kedepannya LKjIP (Laporan Kinerja . Instansi Pemerintah) memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	akan dimasukkan pada Lkip 2024
		3	Dokumen Laporan Kinerja . belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya seperti besaran efisiensi dengan perhitungan dalam mencapai kinerja.	3	Memberikan informasi mengenai upaya . dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).	sudah membuat tabel efisiensi anggaran pada LKIP terbaru

		<p>4 . Belum terdapat bukti dukung rapat penyusunan LKjIP dan rapat evaluasi monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan di Internal SKPD dimana hal tersebut menjadi salah satu data dukung bahwa informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung jawab).</p>	<p>4 . Melaksanakan rapat penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan monitoring dan evaluasi triwulanan kinerja di internal SKPD dan membuat bukti kelengkapannya.</p>	<p>sudah menyusun rapat dokumen laporan LKIP Dan evaluasi triwulanan kinerja internal</p>
		<p>5 . Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi mengenai target kinerja dan anggaran dengan realisasinya dari pegawai untuk mendukung capaian sasaran strategis sebagai bentuk kepedulian seluruh pegawai.</p>	<p>5 . Menambahkan informasi secara umum mengenai target kinerja dan anggaran dengan realisasinya dari pegawai (keterkaitan Seksi, JF dan pelaksanaannya terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Dokumen LKjIP.</p>	<p>Membuat Laporan IKU dan IKI Untuk pelaksana untuk mendukung Dokumen LKIP</p>
4	Evaluasi	<p>1 . Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.</p>	<p>1 . Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.</p>	<p>Sudah menindak lanjuti rekomendasi atas laporan LHE Tahun 2023</p>

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum Capaian Kinerja Kecamatan Lampihong Tahun 2024 hasilnya **sangat memuaskan**. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Lampihong Tahun 2024**

Indikator kinerja	2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	-	109,27	88	87,73	99,69	89	99,69	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sangat memuaskan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	-	100	167	167	100	267	100	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sangat memuaskan
Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ad	100%	Sangat memuaskan
Persentase desa yang tertib administrasi Pemerintahan	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ad	100%	Sangat memuaskan
Persentase desa yang tertib administrasi keuangan	-	100	100%	100%	100%	100%	100	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ad	100%	Sangat memuaskan

4.2. Upaya Perbaikan

Walapun capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lampihong Tahun 2024 hasilnya berhasil, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat Kecamatan Lampihong berpuas diri dan berhenti dalam meningkatkan kinerjanya. Ke depannya Kecamatan Lampihong minimal akan mempertahankan pencapaian tersebut, dan akan selalu berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja dari sisi kualitasnya.

Lampihong, 02 Januari 2025



